BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Penghargaan Lingkungan
Edisi : 03 Juni 2008
Halaman : 14

Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Menhut Dipertanyakan

JAKARTA] Rencana pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup untuk Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban dan ibu negara Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono dari Program Lingkungan PBB (UNEP) dipertanyakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, pemberian penghargaan ini lebih bersifat politis dibanding keselamatan lingkungan hidup.

Direktur Eksektuif Nasional Walhi, Berry Nahdian Furqan, yang dihubungi *SP*, di Jakarta, Selasa (3/6), mengatakan, sebagai lembaga yang memberi penghargaan prestisius, seharusnya UNEP secara transparan memberikan alasan dan kriteria-kriteria mengapa seseorang bisa memperoleh penghargaan itu.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima *SP*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan mengumumkan pemberian penghargaan itu pada puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia, di Jakarta, Kamis (5/6).

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar akan menyerahkan sertifikat kepemimpinan dunia yang dititipkan UNEP untuk Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono atas prakarsa penanaman 10 juta pohon dan juga kepada Menteri Kehutanan MS Kaban untuk penanaman 76 juta pohon. Rachmat Witoelar sendiri merupakan Presiden UNEP tahun 2005-2007.

Menurut Berry, jika penghargaan itu diberikan kepada seseorang yang secara simbolik memimpin pencanangan, maka semua orang bisa membuat acara serupa dan berhak mendapat penghargaan dunia. Sampai saat ini tidak jelas lokasi penanaman jutaan pohon itu dan upaya pemeliharaannya.

"Tidak jelas apakah memang yang ditanam itu 10 juta pohon atau 75 juta pohon, atau hanya puluhan pohon di saat acara seremonial. Siapa yang bisa dan berhak melakukan verifikasi bahwa program itu memang berjalan sesuai dengan pencangannya. Masyarakat tidak tahu," ujarnya.

Harus Diusut

Berry mengatakan, pemberian penghargaan itu justru kontradiktif dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di sektor kehutanan, mengingat laju degradasi hutan yang sangat tinggi. Bahkan, pengalihan kawasan hutan lindung terjadi di berbagai daerah dengan nuansa korupsi.

Hal senada diungkapkan Greenomics Indonesia yang meminta pemerintah membenahi sektor kehutanan. Greenomics mendesak agar penyerobotan areal hak pengusahaan hutan atau hutan tanaman industri (HPH/HTI) yang dijadikan areal perkebunan harus segera ditindak dan diusut, karena praktik ilegal tersebut merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan negara.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

"Praktik penyerobotan hutan negara tersebut ikut menyumbang gundulnya hutan produksi hingga mencapai angka 18,4 juta hektare," kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi.

Menurut Vanda hampir 80 persen dari 18,4 juta hektare (ha) total kawasan hutan produksi yang tak berhutan berada di wilayah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sekitar 8,16 juta ha kawasan hutan produksi di Pulau Kalimantan sudah gundul. Sedangkan di Pulau Sumatera, tidak kurang dari 6,04 juta ha hutan produksi sudah dalam kondisi tak berhutan atau rusak parah.

Vanda juga mengungkapkan, praktik penyerobotan areal HPH/HTI untuk perkebunan sebagian dilakukan melalui izin kepala daerah setempat (bupati). Salah satu contoh, areal HTI di salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang diserobot oleh perusahaan perkebunan setelah mendapatkan izin perkebunan dari bupati.

"Kasus ini jelas-jelas melanggar peraturan perundangan kehutanan, yang tentunya harus diproses secara hukum. Pelakuknya harus ditindak tegas dan dihukum berat. Hutan yang hancur selain merugikan rakyat juga berdampak pada lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat," ujar Vanda.

Di Kalimantan Barat, lanjut Vanda, terdapat 1,4 juta ha areal hutan produksi yang seharusnya merupakan areal konsesi HPH/HTI, namun saat ini telah berubah menjadi areal perkebunan ilegal yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan lokal maupun nasional.

Sedangkan di wilayah Provinsi Riau, sekitar 845.000 ha areal hutan produksi telah diserobot untuk dijadikan areal perkebunan dan pertanian. Bahkan, areal hutan penelitian yang luasnya mencapai 500 kali lipat lapangan sepak bola juga diserobot untuk dijadikan areal perkebunan ilegal. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup